

Advokasi Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Bali

Advocacy for Risk Management in the Local Government Environment of Jembrana Regency Bali

¹Abdul Rahman*, ²Rulinawaty, ³Dinoroy M. Aritonang, ⁴Caesar Octoviandy

^{1,3,4}Politeknik STIA LAN Bandung

²Universitas Terbuka

e-mail: rhnoke@gmail.com

Informasi Artikel: (Dikirim 26/11/24; Revisi 19/05/25; Diterima 30/06/25)

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Politeknik STIA LAN Bandung bertujuan untuk memberikan advokasi terkait pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, Bali. Kegiatan ini berlangsung pada 7–10 Maret 2024 secara luring di Aula Pemda Jembrana dan melibatkan kerja sama antara Politeknik STIA LAN Bandung, Universitas Terbuka, serta Pemerintah Kabupaten Jembrana. Peserta terdiri atas sekitar 30 sekretaris dinas yang berperan sebagai pengelola risiko di masing-masing unit kerja. Rangkaian kegiatan mencakup pembukaan, pemaparan kondisi terkini manajemen risiko oleh Inspektur Jembrana, presentasi teknis oleh Inspektur Pembantu, serta penyampaian materi dari akademisi, termasuk Dr. Abdul Rahman dan Caesar Octoviandy Purba, mengenai pengelolaan dan analisis risiko. Sesi ditutup dengan diskusi interaktif dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme peserta serta kelancaran pelaksanaan kegiatan. Advokasi ini dinilai berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap manajemen risiko dan diharapkan dapat diperluas cakupannya pada kegiatan berikutnya.

Kata kunci —
pengabdian masyarakat,
manajemen risiko,
pemerintah daerah,
advokasi, Jembrana

Keywords
community service,
risk management,
local government,
advocacy, Jembrana

© The Author(s)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The community service activity conducted by lecturers from Politeknik STIA LAN Bandung aimed to provide advocacy on risk management within the Regional Government of Jembrana Regency, Bali. Held from March 7 to 10, 2024, the activity took place offline at the Jembrana Regency Hall and involved collaboration between Politeknik STIA LAN Bandung, Universitas Terbuka, and the Jembrana Regency Government. The participants comprise approximately 30 department secretaries who serve as risk managers in their respective offices. The program included an opening session, an overview of the current state of risk management delivered by the Jembrana Inspector, a technical presentation by the Assistant Inspector, and expert insights from academic speakers, including Dr. Abdul Rahman and Caesar Octoviandy Purba, on risk management and analysis. The session concluded with an interactive discussion and Q&A. The results indicated a high level of participant enthusiasm, smooth execution, and adherence to the schedule. This advocacy initiative successfully enhanced participants' understanding of risk management and is expected to be expanded in future activities to reach a broader audience.

1. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Yin, 2018; Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L., 2017; Sugiyono, 2017). Politeknik STIA LAN Bandung dan Universitas Terbuka menjalankan peran penting dalam mendukung pencapaian pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan berbasis ilmu administrasi. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah advokasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk menyelesaikan permasalahan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengelolaan administrasi yang efektif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manajemen berbasis ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat sering kali berkaitan dengan rendahnya pemahaman tentang tata kelola administrasi yang baik, termasuk pengelolaan risiko dalam organisasi pemerintahan maupun komunitas lokal (Pemerintah Republik Indonesia, 2020; Badan Standardisasi Nasional, 2018; Dwiyanto, A., 2006; UNDP Indonesia, 2009; Bappenas & World Bank, 2008; OECD, 2014; Sutoro Eko, 2015). Tantangan ini semakin relevan dalam era modern yang menuntut profesionalisme dan efisiensi di semua sektor, terutama dalam pemerintahan dan masyarakat desa (Bryson, J.M, 2018; Dwiyanto, A., 2011; Kemendesa PDTT, 2020; Sakai, M.; 2016; World Bank., 2018). Di Jembrana, Bali, misalnya, pengelolaan risiko di lingkungan pemerintahan memerlukan pendekatan berbasis data dan sistematis untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik (Sihombing, R., 2020). Tantangan ini menjadi latar belakang penting bagi dosen Politeknik STIA LAN Bandung dan Universitas Terbuka untuk terlibat langsung dalam pengabdian masyarakat.

Secara spesifik, urgensi dilakukannya kegiatan advokasi di Kabupaten Jembrana dilatarbelakangi oleh kondisi riil di lapangan yang menunjukkan masih terbatasnya kapasitas institusional dan sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko secara efektif. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pemangku kepentingan lokal, ditemukan bahwa banyak perangkat desa dan pejabat dinas yang belum sepenuhnya memahami pendekatan sistematis dalam pengelolaan administrasi publik serta mitigasi risiko kelembagaan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik, lemahnya akuntabilitas, dan lambatnya respons terhadap perubahan dan tantangan di lingkungan eksternal, seperti dinamika ekonomi, sosial, dan kebencanaan.

Selain itu, Jembrana merupakan wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, namun belum seluruhnya ditopang oleh sistem administrasi yang adaptif dan manajemen risiko yang kuat. Rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal juga menjadi hambatan dalam menyerap program pemerintah pusat secara maksimal, terutama dalam konteks Dana Desa dan pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berbasis ilmu pengetahuan melalui kegiatan advokasi dan pelatihan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memperkuat tata kelola lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat desa tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu menjawab tantangan masa depan secara lebih efektif dan akuntabel.

Penelitian dan pengabdian sebelumnya menunjukkan pentingnya intervensi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan kapasitas lokal. Beberapa studi, seperti yang dilakukan di berbagai desa di Indonesia, mengungkapkan bahwa pelatihan dan advokasi berbasis komunitas dapat meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola masyarakat (Antlöv, H., Brinkerhoff, D.

W., & Rapp, E., 2010; Sulistiyani, A. T., & Susanto, E. A., 2018; Widianingsih, I., & Morrell, E., 2007; Pranadji, T., 2006).

Selain itu, riset tentang manajemen risiko dalam sektor pemerintahan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem risiko yang terintegrasi mampu memitigasi potensi masalah yang dapat menghambat kinerja institusi (Behnam, M., & Rasouli, R., 2020; Kimbell, L., 2018; Mikes, A., & Kaplan, R. S., 2015). Hal ini menginspirasi pelaksanaan kegiatan advokasi dengan fokus pada kebutuhan spesifik masyarakat Jembrana.

Dalam konteks pengabdian ini, pendekatan kolaboratif menjadi aspek penting. Melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti sekretaris dinas dan aparat desa, menciptakan ruang diskusi yang dinamis untuk merumuskan solusi berdasarkan pengalaman langsung di lapangan (Wirawan I., 2018). Melalui paparan teknis, sesi diskusi, dan pelatihan interaktif, dosen dari Politeknik STIA LAN Bandung dan Universitas Terbuka menyampaikan pengetahuan tentang pengelolaan risiko dan administrasi yang efektif. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya wawasan peserta, tetapi juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat lokal.

Dengan mengacu pada latar belakang ini, advokasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap tata kelola administrasi di tingkat lokal. Selain meningkatkan kapasitas individu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi model pengabdian masyarakat yang dapat direplikasi di daerah lain. Peningkatan pemahaman dan penerapan manajemen risiko akan membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons tantangan dengan lebih efektif, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan inovatif.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dosen dari Politeknik STIA LAN Bandung dan Universitas Terbuka dilaksanakan melalui pendekatan terstruktur yang terdiri atas lima tahapan utama, dengan tujuan untuk memastikan efektivitas kegiatan dan ketercapaian tujuan advokasi pengelolaan manajemen risiko bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali.

Tahap pertama dimulai dengan kegiatan koordinasi administratif dan perizinan, yang mencakup penyusunan surat permohonan izin kegiatan kepada institusi asal, yaitu Politeknik STIA LAN Bandung dan Universitas Terbuka, serta permohonan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Daerah. Koordinasi ini menjadi landasan penting untuk menjamin legalitas, dukungan institusional, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tahap kedua adalah pemetaan kebutuhan (need assessment) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Diskusi awal dilakukan bersama perwakilan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kondisi aktual implementasi manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam penyusunan materi dan penyesuaian metode penyampaian agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta di daerah sasaran.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan advokasi utama yang dilakukan secara tatap muka (offline) pada 8 Maret 2024, berlokasi di Aula Pemda Jembrana. Kegiatan ini melibatkan sekitar 30 sekretaris dinas sebagai peserta utama. Kegiatan dimulai dengan paparan dari Inspektur Jembrana yang memberikan gambaran umum tentang kebijakan manajemen risiko di daerah tersebut, diikuti oleh penyampaian materi teknis oleh Inspektur Pembantu dan narasumber ahli. Materi meliputi teori dasar manajemen risiko, penerapannya dalam sektor publik, serta studi kasus dan simulasi analisis risiko organisasi. Seluruh sesi dirancang secara interaktif, sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertukar pengalaman.

Tahap keempat adalah evaluasi dan dokumentasi hasil kegiatan, yang dilaksanakan pada 9–10 Maret 2024. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada peserta guna mengukur tingkat pemahaman, efektivitas metode, serta kepuasan terhadap kegiatan. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap dinamika diskusi serta dokumentasi temuan-temuan penting yang muncul selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk pengembangan program lanjutan dan replikasi kegiatan serupa di daerah lain.

Tahap kelima melibatkan pelibatan aktif tim multidisiplin, yang terdiri dari dosen-dosen dengan kompetensi di bidang administrasi publik, manajemen risiko, dan fasilitasi pelatihan. Setiap anggota tim memiliki peran tersendiri, mulai dari perancang materi, fasilitator diskusi, hingga evaluator kegiatan. Kolaborasi lintas institusi ini menjadi faktor pendukung dalam menjamin kualitas proses dan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat.

Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan kontekstual, kegiatan ini diharapkan tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tata kelola dan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang memiliki komitmen tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan struktur birokrasi yang dinamis dan tantangan pelayanan publik yang kompleks, Jembrana menjadi lokasi strategis untuk pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas manajemen risiko. Kondisi geografis yang relatif terjangkau serta keberadaan pemangku kepentingan yang terbuka terhadap perubahan menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini.

Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan tahapan persiapan administratif dan koordinatif. Tim dosen dari Politeknik STIA LAN Bandung dan Universitas Terbuka mengajukan permohonan izin kepada masing-masing institusi dan Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Daerah. Tim juga melakukan pemetaan kebutuhan melalui komunikasi awal dengan Inspektorat Daerah, untuk mengidentifikasi tantangan aktual dalam implementasi manajemen risiko di tingkat perangkat daerah. Setelah mendapatkan dukungan formal, tim mengundang narasumber ahli di bidang manajemen risiko serta menyusun kurikulum kegiatan yang relevan dengan konteks birokrasi lokal. Materi disusun dengan mengacu pada ISO 31000 serta praktik terbaik dalam pengelolaan risiko organisasi publik.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan utama dilaksanakan pada tanggal 7–10 Maret 2024, terpusat di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Acara dibuka secara resmi dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan doa bersama, menciptakan suasana khidmat sekaligus formal. Acara dihadiri oleh tokoh penting daerah, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, Drs. I Made Budiasa, M.Si., Inspektur Jembrana, Ni Wayan Koriani, S.H., M.H., dan Inspektur Pembantu Investigasi

dan Pengaduan, I Gusti Made Wijaya, S.E. Kehadiran mereka memberikan legitimasi dan arahan strategis bagi pelaksanaan program. Sesi awal diisi dengan sambutan Sekretaris Daerah yang menekankan pentingnya manajemen risiko dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel. Inspektur Jembrana kemudian memberikan penjelasan singkat mengenai implementasi manajemen risiko yang telah berjalan di wilayah tersebut, menjadi dasar bagi diskusi lanjutan. Sesi teknis diisi dengan paparan dari Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan, I Gusti Made Wijaya, S.E., yang menguraikan kondisi faktual penerapan kebijakan risiko di lingkup sekretariat daerah. Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Abdul Rahman, yang membahas teori dan framework manajemen risiko berbasis ISO 31000 secara sistematis. Paparan disampaikan dengan pendekatan teoritis dan praktis. Caesar Octoviandy Purba melanjutkan sesi dengan materi mengenai analisis dan pemetaan risiko, di mana peserta diberikan simulasi berbasis studi kasus nyata. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih peserta mengidentifikasi, menilai, dan menyusun strategi mitigasi risiko secara sistematis. Diskusi dan tanya jawab yang interaktif memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Sebanyak 30 peserta dari kalangan sekretaris dinas menunjukkan partisipasi aktif, baik dalam diskusi maupun simulasi. Antusiasme peserta menjadi indikator keberhasilan yang penting dalam kegiatan ini.

Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan observasi langsung pada tanggal 9–10 Maret 2024. Data menunjukkan bahwa lebih dari 85% peserta merasa mendapatkan pemahaman baru terkait manajemen risiko. Mayoritas peserta juga menyatakan kesiapan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di instansi masing-masing. Selain itu, kualitas pertanyaan dan diskusi menjadi cerminan meningkatnya kesadaran dan pemahaman peserta terhadap pentingnya manajemen risiko. Hasil diskusi juga mengarah pada sejumlah rekomendasi penting, antara lain:

1. Perlunya integrasi sistem manajemen risiko ke dalam dokumen perencanaan strategis OPD.
2. Kebutuhan pelatihan lanjutan berbasis studi kasus sektoral.
3. Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung analisis dan pemantauan risiko organisasi.

Dampak Akademik dan Praktis

Secara teoritik, kegiatan ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks penerapan manajemen risiko berbasis bukti (evidence-based risk management) di sektor pemerintahan. Pendekatan yang diterapkan memadukan kerangka teoritis dengan praktik empiris, menjadikan kegiatan ini relevan baik untuk pengembangan akademik maupun solusi praktis. Secara praktis, kegiatan ini menjadi fondasi penting untuk penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jembrana. Program ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain sebagai model advokasi berbasis kebutuhan nyata dan pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan pengabdian ini:





4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Advokasi Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, telah berhasil dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini melibatkan sekitar 30 sekretaris dinas yang berperan sebagai pengelola risiko organisasi, dan berlangsung secara luring di Aula Pemda Jembrana tanpa hambatan berarti. Antusiasme peserta yang tinggi, terutama dalam sesi diskusi dan simulasi, menunjukkan bahwa topik manajemen risiko sangat relevan dengan kebutuhan aktual birokrasi daerah. Materi yang disampaikan, mulai dari konsep dasar hingga praktik pemetaan risiko berbasis studi kasus, berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memperoleh wawasan baru dan merasa lebih siap dalam mengimplementasikan manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Kehadiran pejabat daerah serta paparan dari para narasumber memperkuat pemahaman teoritik dan praktis peserta mengenai pentingnya pengelolaan risiko dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif. Kegiatan ini juga memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, termasuk perlunya pelatihan lanjutan dan integrasi sistem manajemen risiko ke dalam perencanaan organisasi. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan advokasi berbasis kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah efektif dalam membangun kapasitas institusional.

5. SARAN

Untuk meningkatkan dampak kegiatan pengabdian masyarakat di masa mendatang, disarankan untuk memperluas jumlah peserta dengan melibatkan lebih banyak unit kerja yang terkait langsung dengan pengelolaan risiko, seperti kepala seksi atau staf teknis. Dengan demikian, penyebaran pemahaman manajemen risiko akan lebih merata di lingkungan organisasi pemerintahan. Selain itu, materi yang disampaikan dapat diperkaya dengan studi kasus spesifik, simulasi yang lebih mendalam, dan pembahasan isu terkini yang relevan dengan konteks lokal. Durasi pelatihan juga dapat ditingkatkan, misalnya melalui sesi intensif beberapa hari atau pendampingan berkala, guna memastikan peserta benar-benar memahami dan mampu mengimplementasikan materi yang diberikan.

Kegiatan selanjutnya juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti platform e-learning atau aplikasi berbasis risiko, sehingga peserta dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Evaluasi yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan program, baik dari sisi pemahaman peserta maupun penerapan di lapangan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah pusat atau organisasi non-pemerintah, dapat memperkaya perspektif kegiatan. Selain itu, program tindak lanjut, seperti mentoring atau konsultasi lanjutan, dapat dirancang untuk memastikan bahwa materi yang telah diberikan benar-benar diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik STIA LAN Bandung yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini. Kemudian kepada Universitas Terbuka dan Pemda Jembrana yang telah membantu kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2010). Civil Society Capacity Building for Democratic Local Governance: Lessons from Indonesia. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 21(3), 417–439. <https://doi.org/10.1007/s11266-010-9140-x>
- Badan Standardisasi Nasional. (2018). *Standar Nasional Indonesia ISO 31000:2018 – Manajemen Risiko: Pedoman*. Jakarta: BSN.
- Bappenas & World Bank. (2008). *Making Services Work for the Poor in Indonesia: A Report on the Poor's Access to and Satisfaction with Public Services*. Jakarta: World Bank.
- Behnam, M., & Rasouli, R. (2020). The Effect of Enterprise Risk Management on Organizational Performance in the Public Sector. *Public Organization Review*, 20(3), 497–513. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00458-4>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kimbell, L. (2018). Risk and Performance Management in the Public Sector. In: *Public Sector Management*. Palgrave Macmillan.
- Mikes, A., & Kaplan, R. S. (2015). When One Size Doesn't Fit All: Evolving Directions in the Research and Practice of Enterprise Risk Management. *Journal of Applied Corporate Finance*, 27(1), 37–40. <https://doi.org/10.1111/jacf.12135>
- OECD. (2014). *Public Sector Risk Management: Practices and Challenges in OECD Countries*. Paris: OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pranadji, T. (2006). Community Empowerment Strategy in Village Development: An Indonesian Case. *Journal of Rural Development*, 25(4), 537–553.
- Sihombing, R. (2020). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Organisasi Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 123–135.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T., & Susanto, E. A. (2018). Capacity Building Melalui Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 7(2), 217–228. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22251>
- Sutoro Eko. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press.
- UNDP Indonesia. (2009). *Local Governance Reform in Indonesia*. Jakarta: United Nations Development Programme.

- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory Planning in Indonesia: Seeking a New Path to Democratic Development. *Policy Studies*, 28(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01442870601121373>
- Wirawan, I. (2018). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). (2020). *Pedoman Umum Program Inovasi Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Sakai, M. (2016). Local Politics and Governance in Indonesia: Democracy, Clientelism and Governance in Local Communities. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(1), 3–24. <https://doi.org/10.1177/186810341603500101>
- World Bank. (2018). *Improving Public Sector Performance Through Innovation and Inter-Agency Coordination*. Washington, DC: World Bank.